PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUMATERA BARAT

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh:

ADE PUTRA 1109180/2011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII PROGRAM DIII FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2015

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUMATERA BARAT

Nama

: Ade Putra

NIM

: 1109180

Program Studi

: Akuntansi D III

Fakultas

: Ekonomi

Diketahui Oleh:

Padang, 02 Januari 2015

Ketha Prodi

Disetujui Oleh: Pembimbing

Perengki Susanto SE,M.Sc

Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak NIP.19730213 199903 1 003

NIP. 19810404 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUMATERA BARAT

Nama

: Ade Putra

NIM

: 1109180

Program Studi

: Akuntansi D III

Fakultas

: Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 02 Januari 2015

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak

(Ketua)

2. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

(Anggota)

3. Halkadri Fitra, SE.MM.Ak

(Anggota)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Putra

Tahun Masuk/NIM : 2011/1109180

Tempat/tgl.lahir : Malancar /07 desember 1992

Program Study : Akuntansi (DIII)

Alamat : Jln. Srigunting NO.14 Air tawar barat Padang

Judul Tugas Akhir : Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Sumatera Barat

HP : 081220013184

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain

2. Karya tulis ini murni gagasan,rumusan,dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain lain kecuali arahan pembimbingan

 Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat Karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan engikuti tata penilisan karya ilmiah yang lazim

 Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh,tim penguji dan ketua program studi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai atiran yang berlaku

Padang, 14 Januari 2015

Ade Putra NIM.1109180

ABSTRAK

Ade Putra : PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUMATERA BARAT

Pembimbing : FEFRI INDRA ARZA SE,M.Sc,AK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar. Penulis melakukan penelitian ini karena Aset Tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dan mengembangkan sistem informasi yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap pegawai yang sedang bekerja, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang menangani aset tetap milik daerah, dan analisis dokumen dengan cara menganalisis data yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar belum sesuai dengan PSAP 07 tentang Aset Tetap. Alasannya adalah DPKD Sumbar belum pernah melakukan penyusutan karena belum adanya kebijakkan akuntansi dari Pemerintah Provinsi Sumbar untuk melakukan penyusutan tersebut. Tetapi dalam perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut hanya melakukan sistem penghapusan saja. Oleh karena itu Dinas Pengelolaan Keuangan Daeah Sumbar khususnya bidang aset perlu meningkatkan pelatihan/diklat untuk menambah wawasan, kreatifitas dan kinerja pegawai sehingga tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar akan mudah untuk dicapai.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar". Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, diantaranya kepada:

- Teristimewa kepada Orang tua, Alm Ayahanda Basri dan Ibunda Nurati yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk penulis yang tidak ternilai dan terbalas oleh penulis yang diberikan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Semoga Allah SWT mencatatkan nama mereka sebagai penghuni syurgaAamiin
- 2. Bapak Prof. Dr. YuniaWardi. Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNP.
- 3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi dan Ibu Nelvirita, SE M.Si, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- 4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc,Ak, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
- 5. Ibu Salma Taqwa SE,M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama perkuliahan.

- 6. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku penguji I yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
- 7. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis.
- 8. Bapak Zainudin SE.MM, selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar yang telah memberikan izin bagi penulis dalam mengumpulkan data.
- Seluruh pegawai dan staff Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar yang telah memberikan sumbangan ilmu dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 10. Teristimewa juga kepada keluarga Mama is, selaku orang tua angkat dan pimpinan pada kost-an srigunting 14 yang telah banyak mengorbankan begitu banyak hal untuk penulis yang tak ternilai dan terbalas oleh penulis yang diberikan dengan penuh keikhlasan serta kasih sayang.
- 11. Kakanda: Yon Ardilla,Radius,Atismawati, Adinda tercinta Dini Lestari, MazayaAndina Putri dan etek Ernita S,Pd, dan juga mamak Irwan Ayub, yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, motivasi, dukungan moril dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 12. Spesial untuk Rani Vebriananda yang selalu mendampingi penulis saat duka dan suka selama penulis menyusun Tugas Akhir sampai selesai.
- 13. Sahabat setia halim, haris, riza, hafit, indri, suci, dwi, kristi, febri, dan segenap keluarga besar DIII Akuntansi 2011 Genap serta semua sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Makasih banyak atas semua semangat dan kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa baik penganalisian dan pembahasan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis.Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Januari 2015

Penulis Ade Putra

DAFTAR ISI

	Halamaı
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	V
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
A. Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap	8
B. Klasifikasi Aset Tetap	9
C. Pengakuan Aset Tetap	11
D. Penilaian Aset Tetap	13
E. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan	
F. Penyusutan Aset Tetap.	
G. Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap	
H. Pelaporan Atau Penyajian Aset Tetap	
I. Pengungkapan Aset Tetap	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	27
A. Bentuk Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu	
C. Domoon oo	
1. Ionia Danalitian	
1. Jenis Penelitian	
2. Tahapan Penelitian	
D. Metode Pengumpulan data	29
E. Objek Penelitian	
F. Sumber Data	
G. TekliikAlialisis	30
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. GambaranUmum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	31
1. Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangn	
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Da	aerah 33

E	B. Hasil Penelitian	35
(C. Pembahasan	48
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
DAFT	AR PUSTAKA	
DAFT	AR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

- 1. Surat Permohonan Observasi
- 2. Struktur Organisasi
- 3. Neraca Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2012
- 4. Daftar Mutasi barang Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2012
- 5. Daftar Usulan Penghapusan Barang Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset tetap masih merupakan akun yang dikecualikan atau di anggap tidak wajar dalam opini laporan keuangan daerah (pemda) . Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang dihadapi pemda. Beberapa permasalahan yang sering di hadapi oleh pemda antara lain 1) pemda tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya biaya yang sebenarnya menambah biaya perolehan aset tetap. Hal ini terkait kesalahan penganggaran seperti belanja yang seharusnya di anggarkan pada belanja modal tapi di anggarkan seperti belanja barang dan jasa atau belanja pegawai. 2) penilaian aset tetap,pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap dan memadai.yaitu aset tidak di dukung rincian aset, pengklasifisian aset tetap tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). 3) pengamanan aset tetap yang tidak memadai baik secara fisik maupun secara administrasi termasuk diantaranya masalah bukti kepemilikan. 4) aset tetap pada dinas banyak yang belum tercatat. 5) aset tetap dari pemerintah pusat misalnya dari kantor wilayah yang di serahkan kepada pemerintah daerah tidak di dukung rincian yang informatif dan tidak di setai bukti kepemilikan.

Dari semua contoh permasalahan aset di atas barangkali tidak semuanya berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), begitu juga dengan permasalahan lainnya yang terkait aset tetap. Permasalahan aset tetap dapat mempengaruhi aset tetap dapat mempengaruhi opini apabila ada kondisi terjadi pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Kondisi lainnya adalah terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kondisi kondisi ini harus dikaitkan dengan tingkat materialitas akun aset tetap dan dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Permasalahan aset menjadi permasalahan umum yang terus menjadi isu dalam setiap pemberian opini oleh BPK atas pemeriksaan LKPD hingga saat ini tanpa perubahan yang cukup berarti. Tidak wajarnya aset tetap selain menjadi masalah atas akuntantabilitas pengelolaan aset bagi pemda juga akan menjadi beban bagi pemeriksa BPK karna cakupan pemeriksaan yang terus meluas setiap tahunnya. Disini diharapkan peran pemeriksaan LKPD untuk dapat melakukan pengujian yang memadai dan mengasilkan rekomendasi BPK yang tepat agar masalah aset tetap dapat terselesaikan

Menurut Halim (2008:182) Aset tetap merupakan elemen utama dalam perusahaan yang berjumlah besar dan mengalami penyusutan dalam satu periode. Penentuan besarnya jumlah biaya penyusutan aset tetap ini merupakan masalah penting dalam perusahaan, karena besar kecilnya jumlah investasi yang tertanam didalam aset tetap mempengaruhi pada aktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada keuntungan perusahaan. Mengingat pentingnya peranan aset tetap dalam mencapai tujuan perusahaan dan nilainya yang cukup materil maka sangat dibutuhkan suatu

kebijakan terhadap aset tetap yang meliputi harga perolehan, metode penyusutan, pengelompokan biaya, pelepasan aset tetap serta penyajian dineraca.

Aset Tetap dalam PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aktivitas suatu instansi pemerintahan akan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap instansi pemerintahan akan berusaha beraktivitas semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Dimana PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan asset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan asset tetap milik daerah agar asset tetap yang dimiliki dapat dikelola secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07).

Kemudian dalam paragraf 8 (delapan), aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi yaitu: (a) tanah; (b) peralatan dan mesin; (c) gedung dan bangunan; (d) jalan, irigasi dan jaringan; (e) asset tetap lainnya; (f) kontruksi dalam pengerjaan.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat terjadi ketidaktertiban penatausahaan barang administrasi yang harus dilakukan seperti pencatatan dalam buku penerimaan barang,buku pengeluaran barang,kartu inventaris barang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan juga masih adanya egoisme ketugasan dan faktor psikologis staf terhdap pejabat. Pada saat aset tetap dimiliki maka perlakuan akuntansi terkait aset tetap tersebut adalah melakukan pemeliharaan, penyusutan dan revaluasi. Kemudian ketika aset tetap tersebut telah rusak berat maka akan dilakukan penghentian dan penghapusan.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional instansi pemerintahan semakin lama kemampuan aset tersebut akan berkurang dan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan berlalunya waktu atau disebut juga dengan istilah penyusutan, tetapi tidak demikian halnya dengan tanah, karena tanah mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak dapat disusutkan. Berkurangnya kemampuan aset tetap tersebut juga dapat disebabkan karena keterbelakangan teknologi, hal ini berarti berkurang pula nilai aset yang bersangkutan. Pengakuan adanya penurunan nilai manfaat terhadap aset tetap ini perlu dicatat dan dilaporkan dalam suatu penyusutan.

Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengguna aset tetap yang dimiliki dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan menyajikan aset tetap yang dimiliki secara wajar dalam laporan keuangan.

Menurut Bastian (2010:236) Pengeluaran yang terkait aset tetap(setelah perolehan aset) dapat diklasifikasikan sebagai " 1) pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap, 2) pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomiandimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja."

Hal ini sejalan dengan pendapat Bastian (2010:236) menyatakan baik akuntansi berbasis akrual maupun akuntansi pemerintahan di Indonesia mempunyai perlakuan yang sama terhadap transaksi tersebut, untuk kategori yang pertama, perlakuan akuntansi adalah dengan membebankan semua pengeluaran yang terjadi sebagai belanja pemeliharaan, Alasannya adalah pengeluaran tersebut tidak menambah masa keekonomian terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut hanya bersifat agar aset dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses operasional entitas. Sedangkan pengeluaran dalam kategori kedua, pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasi(ditambah ke aset yang bersangkutan) sehingga nilai buku dari aset tersebut akan bertambah. Alasannya adalah pengeluaran yang dilakukan menambah masa manfaat atau masa keekonomian dari aset tersebut, sehingga

biaya yang dikeluarkan seharusnya menjadi penambah nilai aset tetap yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pengawasan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat ditemukan fenomena yang terjadi yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar dimana aset tetap tersebut sering di salahgunakan dan pemilik dari aset tetap tersebut tidak jelas faktanya yang seharusnya milik pemerintah tetapi malah digunakan dalam keperluan pribadi dan inilah masalah yang sering terejadi pada aparatur pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul "Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat".

B. Rumusan Masasalah

- Bagaimanakah pengkuran aset tetap yang di lakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat.
- Apakah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat melakukan penyusutan pada Aset Tetap
- Pada saat apakah Pengapusan dari Aset Tetap Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat di lakukan

C. Tujuan Penelitian

 Agar dapat mengetahui bagaimana pengukuran mengenai Aset Tetap yang dilakukan oleh DPKD Sumbar

- 2. Supaya dapat menganalis Aset Tetap yang di susutkan dalam satu tahun
- Agar kita dapat mengetahui kapan aset tetap tersebut dilakuanpengapusan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengaplikasian ilmu serta untuk mendapatkan gelar sebagai syarat kelulusan Diploma III.
- Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.
- Bagi pembaca dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pengetahuan serta tambahan informasi dalam melakukan sebagian tugas akhir pada objek yang sama.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap

Menurut Mulyadi (1991:591) Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali.

Menurut PSAP No 07:

"Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum".

Menurut Bastian (2000:131)

"Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau yang harus dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun".

Dalam pengertian demikian, berbagai item yang dapat digolongkan sebagai aset tetap berwujud harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- 1. Mempunyai bentuk fisik.
- 2. Dipakai/ digunakan secara aktif didalam kegiatan normal pemerintahan.
- 3. Dimiliki tidak sebagai investasi (penanaman modal) dan atau untuk diperdagangkan.

- 4. Mempunyai jangka waktu atau (umur) relatif permanen (lebih dari satu periode akuntansi/ lebih dari satu tahun).
- 5. Memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

B. Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Asset Tetap dijelaskan bahwa asset tetap didefinisikan sebagai asset berwujud yang mempunyai manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari asset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio; komunikasi; dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi; pengolahan; dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6.Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

C. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai asset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (Abdul Halim: 2008)

- 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;
- 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh asset tetap tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintahan. Manfaat tersebut bisa berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintahan. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir kesuatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika

manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan asset tidak dapat diakui.

Pengukuran dapat dipertimbangkan secara andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian asset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu asset yang dikontruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses kontruksi.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka asset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas asset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Tujuan utama dari perolehanasset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

D. Penilaian Aset Tetap

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatuasset dan dikelompokkan sebagai asset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila asset tetap diperoleh dengan tanpa nilai biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat asset tersebut diperoleh.

Suatu asset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah dihadiahkan ke pemerintah dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir. Suatu asset juga bisa diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatasasset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh.

E. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan

1. Pengeluaran setelah perolehan

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu

komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi asset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk asset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai asset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai asset tetap tersebut.

2. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal

Semakin lamanya suatu asset tetap digunakan selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap asset-asset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu asset tetap juga dapat, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

F. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan didefinisikan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07) penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

Penyesuaian nilai asset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan di investasikan dalam Aset Tetap.

Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai asset. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat asset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnal standar untuk penyusutan adalah sebagai berikut:

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Asset Tetap Akumulasi Penyusutan		XXX	XXX

16

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode

yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang

digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau

kemungkinan jasa (servicepotential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Indra Bastian(2006:203).

Metode Penyusutan yang dapat diterapkan sesuai dengan PSAP 07

adalah:

1. Metode garis lurus (straightlinemethod); atau

2. Metode saldo menurun ganda (doubledecliningmethod); atau

3. Metode unit produksi (unit of productionmethod)

4. Penerapan dari masing-masing metode ini dapat digambarkan melalui

contoh berikut:

Sebuah mesin fotocopy yang dibeli dengan harga Rp10.000.000,00

dan diperkirakan mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dan

kapasitasnya mampu memfotocopy sebanyak 100.000 lembar.

Penyusutan yang dapat dihitung setiap tahun dari mesin ini adalah

sebagai berikut:

1. Metode garis lurus

Tahun I : Rp10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00

Jurnal:

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Asset Tetap		2.500.000	
	Akumulasi Penyusutan			2.500.000
	(Untuk mencatat penyusutan)			

Penghitungan dan jurnal yang sama harus dilakukan untuk 3 tahun berikutnya sehingga nilai dari mesin tersebut pada akhir tahun ke 4 adalah Rp1,00 $\,$

2. Metode saldo menurun ganda

Persentase penyusutan per tahun = $2 \times (100/4) = 50\%$

Tahun I : Rp10.000.000,00 x 50% = Rp5.000.000,00

SKPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Asset Tetap		5.000.000	
	Akumulasi Penyusutan			5.000.000
	(Untuk mencatat penyusutan)			

Tahun II : $(Rp10.000.000,00 - 5.000.000,00) \times 50\% = Rp2.500.000,00$

Jurnal:

SKPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Asset Tetap		2.500.000	
	Akumulasi Penyusutan			2.500.000
	(Untuk mencatat penyusutan)			

Tahun III : $(Rp5.000.000,00 - 2.500.000,00) \times 50\% = Rp1.250.000,00$

Jurnal:

SKPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Asset Tetap		1.250.000	
	Akumulasi Penyusutan			1.250.000
	(Untuk mencatat penyusutan)			

Tahun IV : (Rp2.500.000,00 - 1.250.000,00) = Rp1.250.000,00 (pembulatan)

Jurnal:

SKPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Asset Tetap		1.250.000	
	Akumulasi Penyusutan			1.250.000
	(Untuk mencatat penyusutan)			

3. Metode unit produksi

Persentase penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi pada tahun tersebut

Tahun I : Produksi 30.000 lembar

Penyusutan = (30.000/100.000) x Rp10.000.000,00

= Rp3.000.000,00

Jurnal:SKPD

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	DiinvestasikandalamAssetTetap		3.000.000	
	Akumulasi Penyusutan			3.000.000
	(Untuk mencatat penyusutan)			

Tahun II dan seterusnya penyusutan dihitung berdasarkan produksi pada tahun tersebut, dan penyusutan tersebut harus terus dilakukan meskipun telah melewati umur teknisnya.Bastian Indra(2006:205).

G. Penghentian dan Penghapusan

1. Penghentian

Menurut Mursyidi (2009:196), Suatu aset tetap dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila asset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Asset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan, harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK 08/2007 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk asset tetap dengan cara:

a. Penjualan/Pelelangan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas/Penjualan barang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. Keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan.

b. Ditukarkan

Tukar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

c. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

d. Penyertaan modal negara/daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

Aset tetap dilaporkan dalam neraca sesuai dengan klasifikasi asset tetap dengan akun penyeimbang "Diinvestasikan Dalam Aset Tetap" pada ekuitas Dana Investasi. Nilai aset tetap dikurangi dengan akun Akumulasi Penyusutan. Aset tetap tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang mengungkapkan penjelasan pos-pos asset tetap antara lain berupa dasar penilaian, rekonsiliasi saldo dan mutasi asset tetap, informasi penyusutan, eksistensi dan batasn hak milik, kebijakan akuntansi kapitalisasi, jumlah pengeluaran pos konstruksi dalam pengerjaan, jumlah komitmen untuk akuisisi asset tetap serta informasi lain seperti aset bersejarah.

Jurnal standar untuk penghentian asset tetap dari penggunaannya adalah sebagai berikut:

SKPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX	
	Peralatan dan Mesin			XXX
	Aset Lainnya		XXX	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya			XXX
	(Untuk mencatat penghentian aset tetap)			

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang

akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi asset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka asset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sbb:

SKPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Asset		XXX	
	Tetap			
	Peralatan dan Mesin			XXX
	(Untuk mencatat pelepasan			
	asset tetap)			

2. Penghapusan

(a) Definisi Penghapusan

Definisi penghapusan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisikatas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan barang milik daerah merupakan proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggung jawaban administrative dan fisik barang yang ada

dalam pengelolaan Bendahara Barang/Pengurus Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Jenis Penghapusan

Kalau kita melihat ketentuan pada Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pasal 53, penghapusan barang milik daerah meliputi:

- 1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang. Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- 2. Selanjutnya dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, apabila BMD tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Kepala Daerah.

(c) Dasar Penghapusan

Adapun yang menjadi pertimbangan/alasan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, yaitu :

- Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan alasan sebagai berikut:
- a. Rusak berat terkena bencana alam.
- b. Tidak dapat digunakan secara optimal

- c. Terkena planologi kota
- d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
- e. Penyatuan lokasi karena perkembangan tugas
- 2. Penghapusan barang bergerak berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan Teknis antara lain:
 - Secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki.
 - 2. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat moderenisasi.
 - 3. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa (minimal 10 tahun).
 - Karena penggunaannya mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
 - 5. Selisih kurang yang disebabkan penyusutan dalam penggunaan/penyimpanan.
 - b. Pertimbangan Ekonomis, antara lain:
 - 1. Untuk optimalisasi barang yang berlebih.
 - Secara eknomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karna biaya perbaikan, operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 - 3. Secara efektiitas tidak mengganggu kelancaran tugas.
 - c. Hilang/Kekurangan dan Perbendaharaan/Kerugian, yang disebabkan:

- Kesalahan atau kelalaian penyimpanan barang/pengurus barang.
- 2. Mati bagi tanaman atau ternak
- 3. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga.

(d) Tujuan Penghapusan

Barang milik daerah dihapuskan dengan tujuan sebagai berikut:

- Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban/kerugian dalam pemeliharaan dan perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien.
- 2. Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan.
- 3. Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barangbarang yang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang.

H. Pelaporan Atau Penyajian Aset Tetap

Dasar hukum dari penyajian asset tetap dalam neraca pemerintah adalah sebagai berikut:

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- 2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU No. 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7. Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 8. Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam amanat UU tersebut diatas adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan berupa asset, hutang dan kekayaan pada suatu tanggal tertentu. Salah satu komponen utama dalam neraca adalah aset tetap. Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menyusun neraca, komponen aset adalah hal yang paling sulit untuk diakui. Hal ini terkait dengan banyaknya jenis asset tetap yang dimiliki pemerintah. Pada saat ini neraca yang disajikan pemerintah pencatatan asset tetap ditangani oleh Biro/Bagian Perlengkapan/Umum.

I. Pengungkapan Asset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 79 dijelaskan bahwa Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis asset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1. Penambahan
 - 2. Pelepasan dan penghentian
 - 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 - 4. Mutasi asset tetap
 - 5. Informasi penyusutan, meliputi
 - 6. Nilai penyusutan
 - 7. Metode penyusutan yang digunakan
 - 8. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan pada Bab sebelumnya, yaitu tentang perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar adalah sbb:

- 1. Pengukuran Aset Tetap yang di lakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (S AP) bahwa pengukuran Aset Tetap dicatat sebesar nilai wajar sedangkan untuk peralatan dan mesin diukur agar dapat dilaporkan pada neraca pada akhir tahun serta diukur sebesar nilai wajar pada saat Aset tersebut diperoleh
- 2. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar belum pernah melakukan penyusutan karna belum adanya peraturan dari gubernur untuk melakukan penyusutan tersebut pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar
- 3. Pengapusan Aset Tetap yaitu pada ssat Aset tersebut telah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka Aset Tetap harus dihapuskan dalam pembukuan,jadi hal tersebut belum sesuai dengan PSAP yang mana perlakuan akuntansinya termasuk pengukuran,penyusutan,dan penilaian

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuaraikan diatas kebijakan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat membantu bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar lebih meningkatkan lagi kualitas dalam pemeliharaan aset tetap sehingga aset tetap tersebut tetap terjaga dengan baik dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sehingga pengeluaran biaya dapat diminimumkan sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- Firdaus. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 tahun 2005*. Yogyakart: BPFE.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, A & M. SKusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09.Akuntansi Aset Tetap, Jakarta
- Nazir, Moh. 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *PernyataanStandar* Akuntansi Pemerintah nomor 07, Akuntansi Aset tetap
- Permendagri Nomor 17 tahun 2007 pasal 53, *penghapusan barang milik daerah*
- UNP. 2010. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III. Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Asahan No. 2 Telp. (0751) 7051536 - 7054536 Padang

Padang, 12 Juni 2014

Nomor Lamp.

Hal

: 070/ 97\ /DPKD-Sekt-2014

Izin Observasi

Kepada

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor B.070/831/WAS-BKPol/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Rekomendasi Observasi di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mahasiswa berikut ini :

Nama

: Ade Putra

No. Kartu Identitas Judul Penelitian

: 1109180

: Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Dinas

Daerah Provinsi

Pengelolaan Keuangan Sumatera Barat

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa tersebut dari tanggal 12 Juni 2014 s.d 11 September 2014, dengan mengikuti semua ketentuan sesuai rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATERA BARAT

ISMAYARNI, SE, M.Kes Pendbina Tk. I

NIP. 19650603 199109 2 001

Tembusan:

- 1. Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 2. Yth. Sdr. Sekretaris DPKD Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Yth. Sdr. Kepala Bidang Akuntansi DPKD Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Yang bersangkutan
- 5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No.79 A Telp. (0751)34475-31554

PADANG

Padang, 10 Juni 2014

Nomor

: B.070/ 831 /Was-BKPol/2014

Kepada:

Sifat Perihal

: Rekomendasi Observasi

Yth.Sdr.Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat

di Padang

Dengan hormat,

1. Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Pada Nomor: 4073/UN35.1.7/PP/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal tugas Survey/Penelitian bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

ADE PUTRA

Tempat/Tgl Lahir

Malancar, 7 desember 1992

Pekerjaan

Mahasiswa

Kartu Identitas

1109180

Alamat

Malancar, rao mapat tunggul

Lokasi Penelitian .

DPKD Prov. Sumatera Barat

Waktu/Lama Penelitian

3Bulan

Anggota

akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan tugas akhir dengan judul:

"PERLAKUAN AKUNTANSI **ASET TETAP** DINAS DI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUMATERA BARAT "

- 2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan pengambilan data dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.
- 3. Demikianlah disampaikan Kepada Bapak,atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

ASUBID PENANGANAN KONFLIK BADAN

19630417 199203 1 003

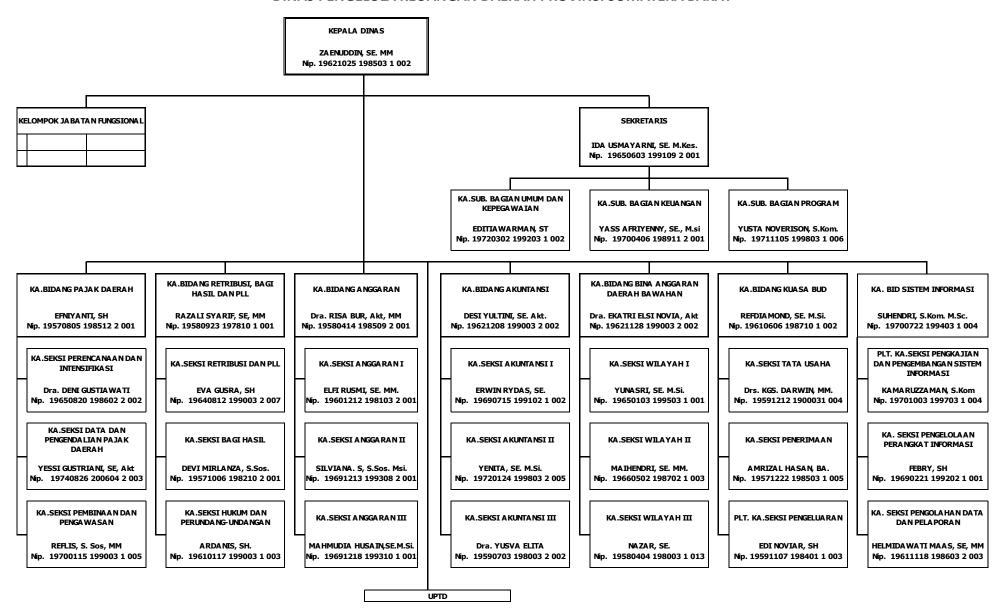
Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta

2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sbg laporan)

3. Yang bersangkutan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUMBAR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2012 (Dalam Rupiah Penuh)

No.	URAIAN	стт	TAHUN 2012	TAHUN 2011	No.	AKTIVA	стт	TAHUN 2012	TAHUN 2011
A	ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan R/K (M) BUD Piutang Retribusi Persediaan	1 2 3 4 5	- - - 392,741,797.00	- - - - 3,240,400.00	D	KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK R/K (K) BUD Utang PFK Utang Jangka Pendek Lainnya		7,288,684,228.00	5,787,702,086.00
	Jumlah Aset Lancar		392,741,797.00	3,240,400.00		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7,288,684,228.00	5,787,702,086.00
В	ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan		2,146,000,000.00 2,168,932,072.00 1,284,141,500.00	2,146,000,000.00 2,038,302,072.00 - 1,267,241,500.00	E	EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Persediaan Ekuitas Dana Lancar Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(7,288,684,228.00) 392,741,797.00 (6,895,942,431.00)	(5,787,702,086.00) 3,240,400.00 (5,784,461,686.00)
С	ASET LAINNYA Aset Lainnya		5,599,073,572.00 -	5,451,543,572.00 101,125,900.00	F	EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset tetap lainnya Diinvestasikan dalam aset lainnya		5,599,073,572.00 - -	5,451,543,572.00 - 101,125,900.00
	Jumlah Aset Lainnya		-	101,125,900.00		Jumlah Ekuitas Dana Diinvestasikan		5,599,073,572.00	5,552,669,472.00
						JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN DIINVESTASIKAN DALAM DANA		(1,296,868,859.00)	(231,792,214.00)
	TOTAL AKTIVA		5,991,815,369.00	5,555,909,872.00		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5,991,815,369.00	5,555,909,872.00

Padang, 31 Desember 2012
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

<u>IDA USMAYARNI SE.M,Kes</u> NIP.19650603 199109 2 002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAFTAR MUTASI BARANG 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012

KODE LOKASI : 09.02

	Nomor		Spesifikasi Barang			1	Asal / Cara	Tahun	Ukuran Barang /	- 1	Keadaan	Jumlah (Awal)		Mutasi / Peruba			ubahan		nlah (Akhir)	
\vdash		1	†		No. Sertifikat/No.	1 .	Perolehan	Perolehan	Konstruksi	١.	Barang	7011	. ,,	Berkurang			rtambah			1
Uru	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Pabrik/No. Chassis/ No. Mesin	Bahan	Barang		(P, SP, D)	Satuan	(B, KB, RB)	Barang	Harga	Barang	Harga	Barang Harga		Barang	Harga	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	TANAH			~	~	~	~	~	~	~	~	2	2,146,000,000	0	0	0	0	2	2,146,000,000	
02	PERALATAN DAN MESIN												3,406,669,472	0	0	0	147,530,000	0	2,168,932,072	
	02.02	Alat-alat besar:																		
			Mesin Gilas	~	~	~	~	~	~	~	~	0		0	0	0	0	0	_	
			Stampler	~	~	~	~	~	~	~	~	0		0	0	0	0	0	_	
	02.03	Alat-alat angkut:										32	855,413,952	ō	ō	0	24,000,000	32	879,413,952	
			Mobil	~	~	~	~	~	~	~	~	7	678,046,500	0	0	0	0	7	678,046,500	
			Sepeda Motor									25	177.367.452	0	ő	2	24.000.000	27	201,367,452	
	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Suzuki	MH8BF45SABJ108489	Metal	Hibah	2012	~	1 unit	В			o	ő	1	12,000,000	1	201,307,432	Ditjen Binapenta
	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	Suzuki	MH8BF45SABJ141065	Metal	Hibah	2012	~	1 unit	В		_	0	ő	1	12,000,000	1		Ditjen Binapenta
	02.03.01.03.01	0002	Sepeda Motor	Juluki	11111001 4337101141003	ivictui	moun	2012		201110						-	11,000,000	1 1		Ditjen binapenta
	02.04	Alat-alat bengkel da	an alat ukur	~	~	~	~	~	~	~	~	0		0	0	0	0	0		
	02.05	Alat-alat pertanian/		~	~	~	~	~	~	~	~	0		0	Ö	ő	0	ő		
	01.03	Print didt pertuinary	L									"				ŭ				
	02.06	Alat-alat kantor dan	rumah tangga										1,024,011,020	0	3,516,900	0	85,840,000		1,106,334,120	
	02.06.01																			
	02.06.01.04.04	0016 - 0025	Filling Kabinet			Metal	Rutin Depnaker	1982		10 unit	RB	25	3,966,000	10	1,586,400	0	-	15	2,379,600	
	02.06.02		_														8,000,000			
	02.06.02.04																8,000,000			
	02.06.02.04.03	0001	AC	LG		Metal	APBD	2012		1 Unit	В			0	0	1	3,500,000			
	02.06.02.04.03	0002	AC	-		Metal	APBD	2012		1 Unit	В				ı °	1				
		0002	AC	Panasonic		Metai	APBD	2012		1 Unit	В					1	4,500,000			
	02.06.02.06																			
	02.06.02.06.39	0001 - 0003	Dispenser	Miyako		Metal	APBD	2009		3 unit	RB	8	5,148,000	3	1,930,500	0	-	5	3,217,500	
	02.06.03	Komputer											460,787,720				77,840,000		538,627,720	
	02.06.03.02	Personal Komputer										23	460.187.720			4	77.840.000	27	538,027,720	
	02.06.03.02.01	01	Komputer PC	Dell Vostro	360 All-In One	Metal	Hibah	2012	~	1 unit	В	_	.,,,,	0	-	1	18,000,000	1	-	BN LP3TKI
	02.06.03.02.01	02	Komputer PC	LG	M2431	Metal	APBD	2012	~	1 unit	В		-	0	0	1	19,965,000	1	-	
	02.06.03.02.01	0003 s/d 0004	Komputer PC	Hp		Metal	APBD	2012		1 unit	В			0	0	2	39,875,000	2		
						~														
	02.07	Alat-alat studio dan	komunikasi	~	~	~	~	~	~	~	~	7	95,794,000	0	0	0	20,790,000	0	116,584,000	
	02.07.01	Alat Studio	l									7	58,674,000	0	0	0	0	0	58,674,000	
	02.07.01.02	Peralatan Studio da	n Film									7	58,674,000						58,674,000	
	02.07.02.	Alat Komunikasi	ļ										37,120,000				20,790,000		57,910,000	
	02.07.02.01	Alat Komunikasi Tel																		
	02.07.02.01.14	0001 s/d 0008	Handy Talkie	Kenwood	THK 3 AT	Metal	APBD	2012		8 unit	В			0	0	8	15,840,000	8	15,840,000	
	02.07.02.01.14	0001	HT Mobil	Ric Icom	IC 2300 H	Metal	APBD	2012		1 unit	В			0	0	1	4,950,000	1	4,950,000	
		1	l			~		_	l	_	~	l .				1		1		1
	02.08	Alat-alat kedoktera		-	~		~		~	~	l	0		0	0	0	0	0		1
	02.09	Alat-alat laboratoriu	ım	~	~	~	~	~	~	~	~	5	66,600,000	0	0	0	0	5	66,600,000	1
	02.10	Alat-alat keamanan		~	~	~	~	~	~	~	~	0		0	0	0	0	0	-	
03	GEDUNG DAN BANGUNA														L					
1	03.11	Bangunan Gedung		~	~	~	~	~	~	~	~	3	1,364,850,500	0	97,609,000	0	16,900,000	3	1,284,141,500	1
1	03.11.01.01.01	Gedung Kantor Perr	manen Eks Kesos PB2	1	l	1	Hibah		Р	unit	В	1	756,183,500	0	0	0	0		756,183,500	1
	03.11.01.01.01		manen Eks Naker UKM	ıl		1	Hibah		P	unit	В	1	511,058,000	0	0	0	16,900,000		527,958,000	1
	03.11.01.01.01	Buffer Stock				1	Hibah		P	unit	RB	1	97,609,000	1	97,609,000	0	0		-	1
	03.12	Bangunan Monume	n	~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	1
	1	1		1	l	1	1		1	ı		1		1	1	1	1			1

	Nomor				Spesifikasi Barang			Asal / Cara	Tahun	Ukuran Barang /		Keadaan	Jumlah (Awal)			Mutasi / P	erubahan		Jun	nlah (Akhir)	
						No. Sertifikat/No.	Bahan	Perolehan	Perolehan	Konstruksi	Satuan	Barang			Berkurang		Bertambah				Ket.
U	ut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Pabrik/No. Chassis/	Dunium	Barang		(P, SP, D)	Jucuun	(B, KB, RB)	Barang	Harga	Barang	Harga	Barang	Harga	Barang	Harga	nct.
					l	No. Mesin									barang	narga	barang	naiga		1	
:	L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	- 1																				
0	4 J	ALAN IRIGASI DAN JARIN	GAN																		
	o	14.13	Jalan dan Jembatan		~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
	Ċ	34.14	Bangunan air/irigasi		~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
	Ċ	14.15	Instalasi		~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
	Ċ	14.16	Jaringan		~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
0	5 4	ASET TETAP LAINNYA																			
	Ċ	05.17	Buku Perpustakaan		~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
	ō	05.18	Barang bercorak kes	enian	~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
	i c	05.19	Hewan temak dan ti	umbuhan	~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
1	- 1						l						1	l							
10	6 K	ONSTRUKSI DALAM PENG	GERJAAN		~	~	~	~	~	~	~	~	0	-	0	0	0	0	0	-	
\vdash	JUMAH												49	5,552,669,472	0	101,125,900	0	147,530,000	0	5,599,073,572	

Mengetahui : :EPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAAN DAERAF Padang, 31 Desember 2012 PENGURUS BARANG

RIZALDI NIP. 19650111 198602 1 002

ZAENUDI SE.MM NIP. 19621025 198503 1 002

DAFTAR ASET YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS DAN SUDAH DICEK OLEH TIM PENGHAPUSAN

	NOMOR			SPE	SIFIKASI BARANG		ASAL / CARA		UKURAN		KEADAAN	JUMLAH			
URU [*]	T KODE BARANG	REGISTER	NAMA / JENIS BARANG	MERK/TYPE	NO. SERTIFIKAT / NO. PABRIK/NO. CHASIS/ NOMOR MESIN	BAHAN	PEROLEHAN BARANG	TAHUN BELI PEROLEH AN	BARANG/ KONSTRUKSI (P, SP, D)	AN		BARANG	HARGA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0001 s/d 0003		Miyako Bertingkat		Metal Metal Beton	Rutin Depnak APBD Hibah	1982 2009	21	m3	RB RB RB	10 3 1 Unit	1,586,400 1,930,500 97,609,000	97,609,000	Ada Fisik Ada Fisik Ada Fisik (Hibah, Sudah Roboh)
		•		•			•		•	101,125,900					

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Padang, 28 Juni 2012 PENGURUS BARANG

ZAENUDDIN SE.MM NIP.19621025 1985 1 002 **RIZALDI**NIP. 19650111 198602 1 002